



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227, Website:
www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 041/Humas/KH/X/2020

Politik Kekerasan: Ancaman bagi Demokrasi dan HAM

Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2019 menyoroti politik kekerasan yang mewarnai sepanjang tahun tersebut, dan telah menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan hak asasi manusia.

Sejak pemilihan umum disepakati sebagai medium demokratis untuk memilih pemimpin, maka setiap orang memiliki hak politik yang sama dan setara. Hak politik tersebut adalah hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Pemilihan umum adalah media untuk memilih pemimpin dan mengganti pemimpin secara damai. Pemilihan umum lantas menjadi ciri khas negara yang demokratis dan modern.

Maka ketika terjadi politik kekerasan pada 2019 yang lalu, tepatnya pada peristiwa pergantian presiden dan wakil presiden, tentu membawa bangsa ini jauh mundur ke belakang. Proses dan hasil pemilihan umum pada 2019 yang telah menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, ternyata disikapi secara tidak bijaksana, sehingga meletus Peristiwa 21-23 Mei 2019 yang melanda sebagian wilayah di ibukota negara dan beberapa kota lainnya. Pada peristiwa itu, Komnas HAM RI mencatat 10 orang meninggal, sembilan diantaranya karena terkena peluru tajam. Disamping itu, ratusan orang luka-luka dan terjadi kerusakan yang parah atas infrastruktur publik. Komnas HAM RI terus mendesak supaya aktor atas peristiwa tersebut ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Komnas HAM RI mencermati politik kekerasan tidak hanya terjadi pada 21-23 Mei 2019, tapi juga terjadi pada 24-30 September 2019, dimana saat itu aksi mahasiswa sebagai agen demokrasi yang menolak beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU KPK, direspon dengan kekerasan. Akibatnya, lima mahasiswa tercatat meninggal, baik yang di Jakarta maupun Kendari, Sultra. Komnas HAM RI juga mendesak agar peristiwa itu diusut tuntas untuk tegaknya hak asasi manusia. Hal ini penting untuk selalu kita ingat dan refleksikan, agar tidak kembali berulang di bumi pertiwi. Setiap politik kekerasan yang ditempuh pasti akan mengorbankan rakyat kecil. Setiap hasil yang didapat dari politik kekerasan juga absurd karena berdiri di atas penderitaan rakyat, dan bentuk dari kesewenang-wenangan atas hak asasi manusia.

Politik kekerasan pada juga tampil dalam muka lain, yaitu berbagai tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, baik ekonomi maupun politik. Berbagai bentuk aduan pelanggaran HAM yang diterima dan ditangani oleh Komnas HAM RI pada 2019, baik di bidang agraria, perburuhan, pembangunan infrastruktur, akses atas keadilan, sejatinya adalah buah dari politik kekerasan karena

mengabaikan kemanusiaan dan keadilan, sehingga tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945. Pada 2019, Komnas HAM menerima 4.778 berkas pengaduan yang sudah dikategorikan dugaan pelanggaran HAM. Dari aduan sebanyak itu, pengaduan terbesar terkait dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (2.425), hak atas keadilan (1.482), dan hak atas rasa aman (278).

Komnas HAM RI juga mencermati politik kekerasan di ranah digital atau siber, yang bisa menyerang siapa saja dan bisa dilakukan siapa saja khususnya yang menguasai sumber daya digital. Maraknya intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan juga dipicu oleh politik kekerasan di dunia digital, diantaranya melalui hoaks dan ujaran kebencian. Upaya Komnas HAM selain melalui penegakan HAM adalah juga mendorong pemajuan HAM, diantaranya melalui Festival HAM dan pendidikan serta penyuluhan HAM kepada aparatur Negara termasuk kepolisian dan masyarakat. Pada 2019, Komnas HAM RI menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, sebagai kaidah dan petunjuk dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri berupaya secara maksimal dalam mengemban mandat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia untuk mendorong terwujudnya situasi pelaksanaan HAM yang kondusif. Laporan tahunan 2019 setidaknya menggambarkan upaya tersebut, meskipun banyak tantangan yang dihadapi sehingga diperlukan perbaikan secara terus menerus. Termasuk dalam hal ini adalah tantangan dalam mendorong penyelesaian berbagai peristiwa yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM RI adalah pelanggaran HAM yang berat. Hak atas keadilan para korban dan keluarganya, masih jauh dari yang seharusnya dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Negara mempunyai kewajiban mutlak untuk menuntaskannya.

Komnas HAM RI menyampaikan permohonan maaf bahwa laporan tahunan 2019 ini terlambat disampaikan ke publik, oleh karena persoalan teknis dan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat kami harus melakukan berbagai penyesuaian. Namun semoga keterlambatan tersebut bisa diobati dengan substansi laporan yang lebih baik dan matang.

Jakarta, 5 Oktober 2020
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Ahmad Taufan Damanik
Ketua

Narahubung:
Ahmad Taufan Damanik (0811-659-718)